

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada putusan yang menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pwt., batal demi hukum karena dalam surat dakwaan tersebut tidak mencantumkan langkah atau upaya administratif yang telah ditempuh/dilakukan oleh Kantor Pajak sebelum dilakukan penyidikan terhadap terdakwa, maka putusan hakim tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip *ultimum remedium* pada perkara tindak pidana pajak. Dengan demikian penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam perkara tindak pidana pajak pada perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pwt., sudah tepat.
2. Akibat hukum terhadap perkara pidana yang surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum maka surat dakwaan yang batal demi hukum dapat diajukan kembali satu kali dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum masih dapat diperbaiki atau disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya berserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Dalam penyidikan perkara tindak pidana pajak hendaknya penegak hukum menerapkan prinsip *ultimum remedium* karena hukum pidana pajak merupakan bagian dari hukum administrasi, sehingga proses penyelesaian perkara pelanggaran pajak harus diutamakan penerapan hukum administrasi.
2. Pada saat menangani kasus pidana pajak, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, karena tindak pidana pajak merupakan tindak pidana administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2005.
- Asmara, Galang, *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Chairil, Tubagus, Amachi Zandjani, *Perpajakan*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1992.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Farid, H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Halim, Abdul dkk., *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hartati, Neneng, *Pengantar Perpajakan*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publising, Malang, 2006.
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Irawan, Hadi, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Kuffal, H.M.A., *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, 2004.

- Lamintang, PAF., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Machmud, S., *Problematika penerapan delik formal dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, fungsionalisasi asas ultimum remedium sebagai pengganti asas subsidiaritas*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Cetakan keenam. Reneka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonsia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Nasution, M.N., *Manajemen Jasa Terpadu*. PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Reneka Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2003.
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Rahman, Abdul, *Administrasi Perpajakan*, Nuansa, Bandung, 2010.
- Resmi, Siti, *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Depok, 2007.
- Sari, Diana, *Konsep Dasar Perpajakan*, Rapika Aditama, Bandung, 2013.
- Sarwono, Jonatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Setiyono, H., *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soemitro, Rochmat, *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*, Graha Ilmu, Bandung, 2012.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, Bandung, 1986.

Sukardji, Untung, *Pajak Pertambahan Nilai*, Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2015.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

B. Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pwt.,

D. Jurnal

- Abuyamin, Oyok, “Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 22, Nomor 01, Februari 2010.
- Achmad, Ruben, “Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan”, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2016.
- Agustina, Enny, “Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial”, *SOLUSI : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Volume 18, Nomor 3, Bulan September 2020.
- Aji, Wahyu Kartika, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma dan Ferry Irawan, “Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Volume 6, Nomor 1, (2022).
- Anggraeniko, Litya Surisdani, “Analisis Asas Ultimum Remedium Studi Keadilan Dan Konsekuensi Paksa Dalam Pengaturan Perpajakan”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 2, Nomor 3, November 2020.
- Beti, Agustina, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciouness*), Kejujuran Wajib Pajak (*Tax Honesty*), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*), Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Disclipne*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Tax Compliance*)” dalam *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, Volume: XX, Nomor: XX
- Damayanti, Nendy, Puspita Adhy Surya Ningsih dan Andi Ersandhi Ramadhan, “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 4 Nomor I, Maret 2022.
- Fitrah, Farrel Alanda, Agus Takariawan, dan Zainal Muttaqin, “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia”, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (April – September 2021).
- Harahap, Nirwana Dewi, “Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari UU NO. 28 TAHUN 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Volume 5, Nomor 3, September 2020.
- Harianty, “Batalnya Surat Dakwaan (*Null And Void*) Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (*Obscuur Libeli*)”, *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/ Feb/2016.

- Hasibuan, Sarah, Madiasa Ablisar; Marlina; Utary Maharany Barus, “Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Oleh Wajib Pajak”, *USU Law Journal*, Vol. 3, No.2 (Agustus 2015).
- Januarsyah, Mas Putra Zenno, “Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi, Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 3 Desember 2017.
- Kariyoto, Bambang Subroto, Sutrisno, dan Rosidi, “Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III)”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 3, Nomor 1, April 2012.
- Larasati, Salsa Voni, “Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak”, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, Vol. 2 (No.1) Tahun 2022.
- Mudzakkir, “Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 - April 2011.
- Mumek, Gabriela Christy, Wasis, “Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia Dan Implikasinya Kepada Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Volume 1 No. 4 Desember 2022.
- Nastuti, Dian Heny, ”Analisis Akibat Hukum Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum Terhadap Status Hukum Terdakwa Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 1 (Januari – April 2021).
- Nur, Muhammad, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Makassar Utara”, *PERSPEKTIF: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, Vol. 03, Nomor 02, Desember 2018.
- Ohoiwirin, Valentino, Ahmad Sholikhin Ruslie, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 2 Mei - Agustus 2022.
- Pamungkas, Hanggoro, “Penyelesaian Sengketa Pajak”, *Binus Business Review*, Vol. 2 No. 1 Mei 2011.
- Pebrina, Rizky, Amir Hidayatulloh, “Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

Pertiwi, Rizka Novianti, Devi Farah Azizah, dan Bondan Catur Kurniawan, “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3, Nomor 1, November 2014.

Putra, I Made Walesa, Marcus Priyo Gunarto dan Dahliana Hasan, “Pemidanaan Wajib Pajak Atas Pelanggaran Kewajiban Perpajakan (Perspektif Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 11, Nomor 1, Mei 2022.

Rahmadita, Lintang Jendro, “Kesesuaian Batal Demi Hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 276/Pid.B/2013/Pn.Mtr)”, *Jurnal Verstek*, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 4 No. 3, Tahun 2016.

Sa’adah, Nabitatus, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2, Issue 1, March 2019.

Sitorus, Binsar, “Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pajak di Indonesia”. *Jurnal Yuridika*, Volume 28, Nomor 1, Tahun 2013.

Suciyani, Fitri, “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal DHARMASISYA*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Maret 2022.

Taliak, Wilhelmus, “Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Taroreh, Junisa Angelia, “Pemeriksaan Dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II / No. 2/April-Juni/2013.

Tiraada, Tryana A.M., “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA*, Vol.1, No.3 September 2013.

Virginia¹, Erja Fitria, Eko Soponyono, “Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021.

Wedhasari, Ratih “Independensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2021.

Yasa, I Kadek Sumadi, I Ketut Rai Setiabudhi, “ Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Korporasi”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10, No. 4, Tahun 2021.

Yumanto, Bina, Paruhum Aurora Sotarduga Hutauruk, “*Ultimum Remedium* Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik“, *Scientax: Jurnal Kjian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Volume 4, No 1 | Oktober 2022.

E. Media Online

KlikLegal.com -2 November 2022 ”*Penafsiran Baru MK: Surat Dakwaan yang Batal Demi Hukum Dapat Diajukan Kembali Satu Kali*”, Sumber: <https://kliklegal.com/penafsiran-baru-mk-surat-dakwaan-yang-batal-demi-hukum-dapat-diajukan-kembali-satu-kali/> diakses Juli 2023

Rahmat, Ariawan, Azas *Ultimum Remedium* pada UU HPP Dinilai Lebih Objektif bagi Wajib Pajak <https://www.ssas.co.id/azas-ultimum-remediun-pada-uu-hpp-dinilai-lebih-objektif-bagi-wajib-pajak/>

Saputra, Dany, Azas *Ultimum Remedium* pada UU HPP Dinilai Lebih Objektif bagi Wajib Pajak <https://www.ssas.co.id/azas-ultimum-remediun-pada-uu-hpp-dinilai-lebih-objektif-bagi-wajib-pajak/>

Wikipedia Ensiklopedi bebas https://id.wikipedia.org/wiki/penyidikan_pajak# diakses 7 Mei 2023, pukul 11.00 WIB